



## Kobarkan Semangat Puputan Tolak Reklamasi

FORUM Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) kembali turun ke jalan bertepatan dengan Hari Puputan Margarana, Jumat (20/11) kemarin. Massa masih menuntut pembatalan rencana reklamasi Teluk Benoa dan pencabutan Perpres No.51

Tahun 2014. Secara khusus, ForBALI juga mendesak DPRD Bali untuk menghentikan upaya-upaya yang memuluskan rencana menguruk Teluk Benoa seluas 700 hektar itu.

**Hal. 19**  
**Rusak Lingkungan**

### Rusak Lingkungan

#### Dari Hal. 1

“Salah satunya, hentikan upaya perubahan Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali,” ujar Koordinator Divisi Politik ForBALI, Suriadi Darmoko. Ia menegaskan, rencana reklamasi tidak saja akan merusak lingkungan di kawasan Teluk Benoa. Tetapi juga di Lombok Barat dan Lombok Timur sebagai lokasi rencana penyedotan pasir. Apalagi, pasir yang akan dikeruk berjumlah sekitar 70 juta meter kubik atau setara dengan 23 juta truk pasir.

“Kami sudah dengar langsung dari nelayan bahwa di lokasi penyedotan pasir di Lombok Timur itu *fishing ground* atau daerah tangkapan ikan. Mata pencaharian nelayan akan hilang karena rusaknya wilayah tangkapan mereka. Jadi reklamasi ini tidak saja mengancam Bali, tetapi juga Indonesia,” tegas Suriadi.

Dikatakannya, ngototnya upaya reklamasi sesungguhnya adalah bentuk kegagalan terhadap masalah di Teluk Benoa. Jika terjadi pendangkalan di sana, seharusnya dilakukan pendalaman. Bukan malah pengurukan yang justru akan menyebabkan pendangkalan permanen di Teluk Benoa. “Teluk Benoa harus dikembalikan menjadi kawasan konservasi dan dikelola dengan cara-cara yang selaras dengan prinsip konservasi, sehingga kelak Teluk Benoa benar-benar akan menjadi masa depan peradaban Indonesia,” jelas Suriadi.

Koordinator ForBALI Wayan “Gendo” Suardana

mengatakan, aksi turun ke jalan ini sekaligus memperingati Hari Puputan Margarana dan Hari Anak Internasional. Bila pejuang dalam Puputan Margarana melawan kerakusan kolonial, maka ForBALI melawan kerakusan penguasa dan pengusaha. Upaya ini sekaligus memperjuangkan kelangsungan alam untuk anak di masa mendatang.

“Jadi semangat nasionalisme tidak cukup hanya mengibarkan bendera Merah Putih tetapi adalah menjaga seluruh sumber daya alam bangsa ini supaya tidak dimiliki oleh segelintir elite, segelintir korporasi yang justru akan membuat cita-cita dari konstitusi pasal 33 itu menjadi terdistorsi,” ujarnya.

Gendo pun mengkritisi upaya revisi Perda RTRWP Bali oleh dewan. Menurutnya, upaya revisi tidak pernah dalam rangka membangun pola ruang dan struktur ruang yang bagus. Revisi RTRW selalu saja diupayakan untuk menjadi alat legitimasi bagi korporasi, modal, dan proyek semata. Apalagi upaya merevisi kali ini justru dikaitkan dengan Perpres No.51 Tahun 2014.

“Saya pikir ini hanya bagian dari melegitimasi kepentingan korporasi dan selalu begitu, sehingga kepentingan ruang untuk publik, untuk rakyat, tidak pernah menjadi prioritas. Tetapi hanya menjadi jargon saja. Kepentingan sesungguhnya adalah kepentingan modal dan menghindarkan pejabat berwenang dari tuntutan pidana ketika dia melanggar rencana tata ruang. Jadi ini bagian dari pemutihan pelanggaran tata ruang,” tegasnya. (kmb32)

Edisi : Sabtu, 21 November 2015

Hal : 1 dan 19



Melonjak Drastis hingga Rp 165 Miliar Lebih

# Dewan Tuding Belanja Pegawai Jor-joran

Mangupura (Bali Post) -

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Badung 2016, kembali menuai protes dari kalangan wakil rakyat di DPRD Badung. Pasalnya, dalam rancangan tersebut terjadi peningkatan belanja pegawai hingga Rp 165 miliar lebih, sementara kebutuhan rakyat lainnya dialokasikan minim. Dewan pun menuding belanja pegawai tersebut jor-joran.

Pejabat Bupati Badung Harry Yudha Saka dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Jumat (20/11) kemarin memaparkan, belanja pegawai 2016 dirancang Rp 1,28 triliun lebih. Jumlah ini naik sekitar 14,8 persen dibandingkan APBD Induk 2015 yang tercatat Rp 1,117 triliun. Kenaikannya mencapai Rp 165,4 miliar.

Anggota Komisi III DPRD Badung Made Sumertha usai rapat mengatakan, dibandingkan dengan alokasi untuk sektor publik atau kebutuhan rakyat, kenaikan belanja pegawai sangat fan-

tastis. "Karena itu, RAPBD ini sangat tidak pro-rakyat," tegasnya.

Adanya kenaikan belanja pegawai yang sangat fantastis tersebut, Sumerta mengaku akan mengkaji kembali. Apakah kenaikan ini diperlukan, selanjutnya *break down*-nya seperti apa? Dia cenderung merasionalisasi kenaikan belanja pegawai tersebut. Hasil rasionalisasi ini nantinya dialokasikan untuk program-program yang memang dibutuhkan masyarakat.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga menilai

ketimpangan anggaran juga terjadi di sektor lainnya. Misalnya dukungan untuk usaha ekonomi produktif (UEP) yang hanya memperoleh alokasi Rp 4,5 miliar untuk 600 rumah tangga sasaran. Jadi, tiap RTS memperoleh hanya Rp 7,5 juta. "Dalam kerangka meningkatkan ekonomi keluarga, stimulus bagi UEP harusnya bisa ditingkatkan. Dana Rp 7,5 juta ini hanya cukup untuk sewa tempat," katanya.

Sementara komoditi yang akan diproduksi maupun diperdagangkan, katanya, belum ada. "Badung berpeluang membantu UEP hingga Rp 10 juta per RTS," tegasnya.

Demikian juga untuk santunan kematian. Pada RAPBD 2016, Badung merancang santunan kematian hanya Rp 5 miliar untuk 2.000 orang. Jadi, santunan kematian hanya Rp 2,5 juta per orang. Menurutnya,

dana ini jelas tidak cukup, walau hanya untuk upakara atau *banten*. "Kami menilai Badung layak memberikan santunan kematian hingga Rp 5 juta. Dengan begitu, keluarga korban (terutama tak mampu) tak lagi terbebani," ungkapnya.

Dimintai konfirmasi terkait kenaikan belanja pegawai ini, Penjabat Bupati Badung Nyoman Yudha Saka mengatakan, kenaikan belanja tidak langsung bagi pegawai ini untuk kegiatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kenaikan ini berkaitan dengan kinerja pegawai. "Kami harapkan peningkatan PAD juga diimbangi dengan peningkatan penghasilan pegawai. Itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," terangnya seraya menyebutkan, besaran angka tersebut sudah sesuai anjuran pihak KPK. (kmb27)

Edisi : Sabtu, 21 November 2015

Hal : 3



## Setwan Dapat Enam Mobil Dinas

Semarapura (Bali Post) -

Pemkab Klungkung diam-diam melakukan pengadaan delapan unit mobil dinas pada anggaran APBD Perubahan Tahun 2015. Dari jumlah itu, enam unit ternyata diberikan kepada Sekretariat DPRD Klungkung sebagai operasional, sedangkan sisanya untuk mobil dinas Kadisdikpora dan operasional wakil bupati.

Sekwan Klungkung Wayan Sudiarta ketika diminta konfirmasinya, Jumat (20/11) kemarin, mengatakan, pihaknya sebenarnya mengusulkan 10 unit mobil dinas pada Rancangan APBD Induk Tahun 2016. Tetapi usulan ini tiba-tiba saja ditolak dan dibatalkan.

Ia mengakui mendapat jatah enam unit mobil dinas jenis Avanza dalam APBD Perubahan Tahun 2015. Keenam mobil dinas tersebut rencananya dipakai untuk operasional di Setwan. Namun, keenam mobil dinas jenis Avanza tersebut bukan usulannya, melainkan diberikan Bagian Perlengkapan Pemkab Klungkung untuk menggantikan mobil dinas jenis carry yang ada di Setwan.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Perlengkapan I Gusti Ngurah Agung membenarkan adanya pengadaan enam mobil Avanza untuk kepentingan operasional Setwan. Keenam mobil diberikan sebagai pengganti lima mobil operasional Setwan sebelumnya. Kondisi mobil operasional Setwan sekarang jenis carry sudah tua, sehingga perlu peremajaan.

Menurut Ngurah Agung, biaya pengadaan mobil dinas tersebut cukup besar. Harga mobil per unit di katalog sekitar Rp 204.000.000. Jadi, jika dikalikan tujuh unit ditambah mobil Inova, biaya yang dikeluarkan dalam APBD Perubahan mendekati Rp 2 miliar. "Intinya mobil yang lama sudah tidak efektif untuk operasional. Kalau dipaksakan pemeliharaannya boros," ujarnya. Kelima mobil carry yang ditukar akan dilelang. (kmb)

Edisi : Sabtu, 21 November 2015

Hal : 10



**PERTEMUAN**  
- Suasana pertemuan antara jajaran Pemkab Gianyar dengan Pemkot Yogyakarta membahas masalah penyampaian Lakip.

Bali Post/ded

## SKPD Masih Kesulitan Susun Lakip

Gianyar (Bali Post) -

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja setiap instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi. Lakip telah diwajibkan mulai tahun 2000 sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Namun sampai saat ini masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyampaian laporan tersebut. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara jajaran Pemkot Gianyar dengan Pemkot Yogyakarta di Kantor Bupati Gianyar, Jumat (20/11) kemarin.

Menurut Asisten Pemerintahan Pemkot Yogyakarta H. Ahmad Fadli, perhatian pihaknya terhadap

akuntabilitas kinerja ini sangat penting. Pasalnya, hal tersebut menjadi salah satu upaya dalam rangka mewujudkan instansi yang akuntabel.

"Akuntabilitas kinerja haruslah diwujudkan, sehingga SKPD tidak hanya membelanjakan dana APBD, namun lebih kepada penguatan dan peningkatan kinerja. Dengan begitu, anggaran berbasis kinerja yang lebih baik bisa terwujud," katanya.

Hal ini pula yang mendasari kunjungan pihaknya ke Gianyar yakni untuk studi banding tentang Lakip, perencanaan dan evaluasi pembangunan. Bahkan saking pentingnya pemahaman tentang penyampaian Lakip, jumlah rombongan

Pemkot Yogyakarta yang datang ke Kabupaten Gianyar pun tergolong cukup banyak yakni 36 orang. "Mereka merupakan perwakilan dari seluruh SKPD hingga kecamatan di Kota Yogyakarta," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar I Made Juanda mengatakan, Lakip merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja setiap instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi. Tujuannya untuk terciptanya kinerja yang optimal dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBD di setiap SKPD.

Dalam penyusunan atau pelaporan Lakip, ataupun laporan keuangan di daerah, dipastikan ada

kendala yang dihadapi. Maka dari itu, pihaknya berharap ada kesamaan pemahaman dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

Lebih lanjut dijelaskannya, tahun ini baru pertama kalinya Kabupaten Gianyar meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang sebelumnya hanya meraih opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Predikat tersebut diraih atas dasar kerja keras semua pihak atau SKPD sehingga laporan keuangan Kabupaten Gianyar bisa naik kelas. Peningkatan ini merupakan indikator untuk mewujudkan asas pemerintahan yang baik. (kmb25)

Edisi : Sabtu, 21 November 2015

Hal : 5